

PROSIDING SEMMAU 2016

**SEMINAR NASIONAL & KONFERENSI SISTEM INFORMASI,
INFORMATIKA & KOMUNIKASI**

**TEMA: E-GOVERNMENT SEBAGAI DAYA DUKUNG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Kupang, 17 September 2016

BUKU 2

ISBN: 978-602-73628-0-3



STIKOM UYELINDO KUPANG

PROSIDING SEMMAU 2016

KOMITE

Penulis :

Pemakalah Seminar Nasional & Konferensi Sistem Informasi, Informatika & Komunikasi (SEMMAU 2016)

ISBN : 978-602-73628-0-3

Komite Program :

Dr. Ir. Rila Mandala, M.Eng. (ITB)
Dr. Achmad Nizar, S.Kom., M.Kom. (UI)
Ir. Dana Indra Sensuse, M.Lis., Ph.D. (UI)
Prof. Daniel Herman Fredy Manongga, M.Sc., Ph.D. (UKSW)
Prof. Mustafid (UNDIP)
Prof. Dr. Ir. Kuswara Setiawan, M.T. (UPH)
Prof. Suyoto, P.hd

Penyunting :

Max ABR. Soleman Lenggu. S.Kom., M.T.
Marinus I.J. Lamabelawa, S.Kom., M.Cs
Fransiska S.E. Atonis
Floriany M. Owa
Marmi Y. Taek
Adirwan Tajudin
Maystri R.A. Ta'eko
Ahmad Suhendra

Desain Sampul :

Max Lenggu

Redaksi :

Dapur Semmau

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengembangan pada Masyarakat
Jl. Perintis Kemerdekaan 1, Kayu Putih, Kupang, NTT, Indonesia.
Telp. (0380)8554501, Fax (0380) 8554501
Email : semmau@uyelindo.ac.id
<http://www.semmau.uyelindo.ac.id>.

Penerbit :

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang.
Jl. Perintis Kemerdekaan 1, Kayu Putih, Kupang, NTT, Indonesia.
Telp. (0380)8554501, Fax (0380) 8554501
Email : stikom@uyelindo.ac.id
<http://www.uyelindo.ac.id>.

Cetakan kedua September 2016

Hak Cipta di Lindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PROSIDING SEMMAU 2016

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang tanpa henti mengucurkan rahmat dan karuniaNya, baik kurunia sehat, rejeki, kecerdasan, kemauan, dan bahkan juga karunia dalam bentuk kesadaran dan kemampuan bersyukur kepadaNya, dan dengan ijinnya Prosiding Seminar Nasional dan Konferensi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Komunikasi (SEMMAU) tahun 2016 dengan Tema “E-GOVERNMENT SEBAGAI DAYA DUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN”. dapat kami terbitkan.

Buku Prosiding ini berisi sekumpulan *Paper* dari hasil penelitian ilmiah yang telah diseleksi, untuk dipresentasikan dalam kegiatan Seminar Nasional dan Konferensi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Komunikasi (SEMMAU) tahun 2016 dan bertempat di *Ballroom* Sotis Hotel Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 September 2016, kegiatan ini diikuti oleh peserta pemakalah yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT), maupun di luar NTT, yang terdiri dari 26 makalah dari para peserta pemakalah.

Seminar Nasional yang bertemakan “E-GOVERNMENT SEBAGAI DAYA DUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN”. ini menghadirkan pembicara utama berkelas nasional yakni Prof. Dr. Ir. Ricardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Reviewer Paper dan pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan Seminar Nasional dan Konferensi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Komunikasi (SEMMAU) tahun 2016 ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, jika ada yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan seminar maupun dalam penerbitan buku prosiding ini mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa depan. Amin.

Kupang, September 2016
Panitia,

Yampi R. Kaesmetan

PROSIDING SEMMAU 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
BERBAGI PENGETAHUAN MENGGUNAKAN EDMODO BERBASIS SOCIALIZATION MODEL SECI (Studi Kasus : SMK Negeri 1 Boyolali). <i>Dwi Kristiani, Eko Sedyono, Ade Iriani</i>	206 - 214
ANALISIS TOPIK-TOPIK YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA SENTIMEN TERKAIT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA MEDIA ONLINE" <i>Bobby Christian Sandy, Danny Manongga, Ade Iriani.</i>	215 - 224
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA. <i>Dien Novita.</i>	225 - 229
ADLER-32 INTEGRITY VALIDATION IN 24 BIT COLOR IMAGE. <i>Andysah Putera Utama Siahaan.</i>	230 -235
DESAIN UNTUK RANCANG BANGUN FITUR KEAMANAN. <i>Wawan Nurmansyah, Masayu Jamilah.</i>	236 - 242
PENERAPAN E-BISNIS UNTUK MENANGANI PROSES PENJUALAN PRODUK AGUAMOR BERBASIS WEB. <i>Dewi Anggreini</i>	243 - 247
KLASIFIKASI BELIMBING MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBORS (KNN) BERDASARKAN CITRA RED-GREEN-BLUE (RGB) <i>Kana Saputra S, Fuzy Yustika Manik.</i>	248 - 251
IMPLEMENTASI PEMECAHAN SLIDING TILE PUZZLE MENGGUNAKAN METODE HEURISTIK (ALGORITMA A*, IDA* DAN BDA*) <i>Sabastianus A.S.Mola.</i>	252 - 259
ANALISIS SISTEM ANTRIAN DENGAN METODE NEXT EVENT TIME ADVANCED MECHANISM (Studi Kasus: PT. ASDP Persero Cabang Kupang) <i>Ardianus Wattileo, Marianus I.J. Lamabelawa</i>	260 - 264
MODEL PENGUKUR BERAT BADAN TERNAK SAPI TIMOR BERBASIS CITRA <i>Deddy B. Lasfet, Markus Daud Letik</i>	265 - 271
PENERAPAN ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT UNTUK PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Kabupaten Rote Ndao) <i>Wemmy A. Taka, Max ABR Soleman Lenggu.</i>	272 - 278

PROSIDING SEMMAU 2016

PENCARIAN LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DI KOTA KUPANG BERBASIS LOKASI <i>PENIDAS</i>.	279 - 283
<i>Nyongri E. Akulas, Edwin Malahina, Fransiskus Tjiptabudi.</i>	
SORTASI TEKSTUR BIJI JAGUNG SEBAGAI BENIH TANAM MENGGUNAKAN SELF ORGANIZING MAP (Studi Kasus: Desa Bismarak Kabupaten Kupang Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur).	284 - 288
<i>Marlinda Vasty Overbeek</i>	
MODEL SISTEM MONITORING DAN EVALUASI AKADEMIK MAHASISWA BERBASIS WEB (STUDI KASUS STIKOM UYELINDO KUPANG).	289 - 294
<i>Rafliana Natalia da Silva, Marinus I.J. Lamabelawa, Semlinda Juszandri Bulan.</i>	
PEMETAAN HASIL LAUT WILAYAH KABUPATEN ALOR DENGAN ANALISIS KELOMPOK.	295 - 304
<i>Kristian Martiul Malbiyeti Tnunay, Remerta Noni Naatonis, Marlinda V. Overbeek.</i>	
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN CALON PENERIMA RUMAH BANTUAN MENGGUNAKAN METODE PROMOTHEE.	305 - 308
<i>Dony M Sitohang</i>	
SISTEM INFORMASI GOEGRAFIS POLA PENYEBARAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING.	309 - 317
<i>Yovita Hilda Helly, Yampi Kaesmetan, Mardhalia Saitakela.</i>	
PERBANDINGAN PENGUKURAN JARAK DALAM PENENTUAN KUALITAS BENIH JAGUNG PULAU TIMOR DENGAN K-NEAREST NEIGHBOR.	318 - 323
<i>Dessy Leonarti Pollo, Marlinda Vasty Overbeek, Franki Yusuf Bisilin</i>	
APLIKASI EVALUASI TENAGA AHLI PESERTA SELEKSI NASIONAL MENGGUNAKAN METODE TOPSIS (Studi Kasus: Satker P2JN Provinsi Nusa Tenggara Timur).	324 - 330
<i>Albert Adrian Bayu Mila1, Menhya Snae2, Franki Yusuf Bisilisin.</i>	
LELANG ONLINE BERBASIS WEBSITE PADA PEGADAIAN CABANG OESAO	331 - 340
<i>Adalberto Guterres, Benyamin Jago Belalawe, Mardhalia Saitakela</i>	
EVALUASI KINERJA DOSEN DAN KARYAWAN DI STIKOM UYELINDO KUPANG BERBASIS WEBSITE.	341 - 349
<i>Lukas H.J.E. Babu, Emanuel Safirman Bata, Marlinda Vasty Overbeek</i>	
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI PERBATASAN LAUT SAWU NUSA TENGGARA TIMUR.	350 - 358
<i>M. Nurhudah, Yampi R. Kaesmetan, Remerta Noni Naatonis</i>	
APLIKASI TUNTUNAN DOA SEHARI-HARI DIZIKIR DAN SUNNAH RASUL BAGI UMAT ISLAM BERBASIS ANDROID.	359 - 364
<i>Mastura Masan, Emanuel Safirman Bata, Edwin A.U. Malahina</i>	

PROSIDING SEMMAU 2016

- ANALISI PEMASARAN RUMPUT LAUT KECAMATAN SULAMU
MENGUNAKAN METODE PERBANDINGAN EKSPONENSIAL (MPE).** 365 - 369
Melkianus Babis, Max ABR Soleman Lenggu.
- PERBANDINGAN EKSTRAKSI TEKSTUR CITRA DENGAN METODE STATISTIK
ORDE I DAN STATISTIK ORDE II UNTUK PEMELIHAN BENIH JAGUNG.** 370 - 380
Antonius Yosef Tampani, Petrus Katemba.
- MANAJEMEN KINERJA KEPALA SEKOLAH DAN GURU DALAM
PENINGKATAN MUTU PAUD.** 381 - 387
Hasibun Asikin
- KAJIAN SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA NTT
SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT.** 388 - 393
Maria Yenita Soru, Yohanes Payong

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA

Dien Novita

Jurusan Sistem Informasi, STMIK GI MDP
dien@mdp.ac.id

Abstrak

Untuk menghadapi perubahan kemajuan teknologi pemerintah Indonesia telah mulai mengimplementasikan *e-Government* di setiap instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Implementasi *e-Government* di Indonesia diawali dengan pembuatan situs *web* pemerintahan dengan menyediakan layanan *online*. Tetapi dari kenyataan yang ada, banyak negara yang mengawali program-program *e-Government* 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan *e-Government* tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara *online* telah dilakukan. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana implementasi *e-Government* di Indonesia. Implementasi *e-Government* di Indonesia, menurut lembaga dunia PBB masuk dalam kategori menengah jika ditinjau dari nilai EGDI, yaitu rata-rata sebesar 0,4487 dari tahun 2010-2014. Sedangkan implementasi *e-Government* di Indonesia, menurut KEMKOMINFO masuk dalam kategori baik jika dilihat dari tingkat provinsi, yaitu rata-rata sebesar 2,5 tahun 2015. Peluang terbesar Indonesia adalah perkembangan penetrasi internet di Indonesia yang luar biasa, sebanyak 55 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet, hampir setengahnya 48% mengakses melalui ponsel, dan sekitar 13% dari perangkat bergerak lainnya. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah ketimpangan kualitas infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah yang beragam, variasi tingkat melek internet dan teknologi secara umum antar daerah di Indonesia.

Kata kunci: *implementasi, e-Government, EGDI, PBB, KEMKOMINFO*

1. PENDAHULUAN

Sekarang ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental terkait perubahan kemajuan teknologi informasi. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang lebih fleksibel dalam melayani masyarakat, respon yang cepat, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk menghadapi perubahan kemajuan teknologi tersebut pemerintah telah mulai mengimplementasikan *e-Government* di setiap instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Implementasi *e-Government* di Indonesia diawali dengan pembuatan situs *web* pemerintahan dengan menyediakan layanan *online*.

Tetapi dari kenyataan yang ada, banyak negara yang mengawali program-program *e-government* 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan *e-Government* tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara *online* telah dilakukan [1]. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana implementasi *e-Government* di Indonesia.

E-Government merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan organisasi dan mengarahkan kepada tata pemerintahan yang baik. Diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini *website e-Government* harus bersifat interaktif (minimal ada alamat *e-mail* yang secara teratur dibaca dan dibalas)

agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat dapat mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi tersebut [2].

2. E-GOVERNMENT

E-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, *e-Government* adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan [3]. Jadi intinya *e-Government* adalah proses perubahan pola layanan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, sehingga lebih praktis, cepat, dan bermanfaat. Pola layanan yang contoh sebelumnya berinteraksi harus bertatap muka dapat diganti dengan interaksi secara online dengan pemanfaatan internet melalui *mobile* dan komputer.

Tujuan dari *e-Government* ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya, semakin banyak layanan *online* yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap *e-Government*. *E-Government* hanya akan berhasil apabila ada permintaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat. Beberapa

permintaan ini akan datang dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat dan lebih baik. Masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan *e-Government* melalui penyediaan konten digital yang dapat diakses, menarik, dan relevan. Secara khusus, hal-hal berikut harus diimplementasikan untuk meningkatkan permintaan dan dukungan bagi layanan *e-Government*[4]:

1. Mengembangkan infrastruktur penyediaan layanan umum satu pintu yang *multi-channel*, meliputi pusat layanan masyarakat berbentuk fisik (di Indonesia, dikenal dengan layanan satu atap) dan tempat akses publik (*public access point*) lainnya seperti *telecentre*, *call center*, portal *web*, dan portal *mobile*.
2. Mengimplementasikan ukuran-ukuran yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang didukung TIK dan berbagai interaksi lainnya dalam lingkungan digital.
3. Meningkatkan pengembangan konten *mobile* dan *online* yang mudah digunakan, menarik, dan relevan, termasuk yang dikenal dengan '*killer applications*'.
4. Mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan TIK serta konten *mobile* dan *online*.

Telah banyak diketahui bahwa implementasi *e-Government* di banyak negara tidak menemui harapan. Salah satu studi menunjukkan bahwa 35 persen dari program-program *e-Government* di dunia mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil [5].

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penerapan *e-Government* di negara berkembang meliputi [4]:

1. Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik, yaitu penolakan internal oleh pemerintah.
2. Kurangnya rencana dan strategi, yaitu *e-Government* diperkenalkan dengan setengah-setengah dan tidak sistematis.
3. Kurangnya SDM, yaitu kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personel
4. Tidak adanya rencana investasi.
5. Kurangnya vendor sistem dan TI.
6. Ketidakmatangan teknologi, yaitu terlalu menekankan teknologi atau penerapan yang berorientasi teknologi.
7. Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup.

Tantangan yang paling penting ialah menyadari bahwa tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Asia dan Pasifik dikenal dengan

konteks politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang sangat beragam, yang masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda-beda.

3. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian sebelumnya[6], telah dilakukan penelitian berjudul "Korelasi Korupsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesuksesan *e-Government* di Suatu Negara". Penelitian tersebut membuktikan bahwa kesuksesan *e-Government* di suatu negara akan sulit tercapai jika tingkat korupsinya masih tinggi, sedangkan untuk negara yang padat penduduknya tidak dapat menjamin untuk kesuksesan implementasi *E-Government* dikarenakan besarnya dukungan dari masyarakat. Tahun 2015, Indonesia menempati urutan ke 88 dari 168 negara yang diamati Lembaga Transparency International dengan skor indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) sebesar 36 yang masih dibawah rata-rata skor dunia sebesar 43. Artinya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat korupsi yang masih tinggi, akan cukup sulit menerapkan *e-Government* dengan baik.

Dalam penelitian sebelumnya[7] juga, telah dilakukan penelitian berjudul "Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan". Dari penelitian tersebut memberikan gambaran tentang hambatan pengembangan *e-Government* di Indonesia khususnya Pemerintah Kota Palembang, yaitu lemahnya faktor kepemimpinan, langkanya SDM, kesenjangan digital, kurangnya koordinasi, dan lemahnya pengaturan.

4. METODE PENELITIAN

Untuk melihat implementasi *e-Government* di Indonesia maka perlu dilakukan langkah-langkah penelitian yaitu mengumpulkan data sekunder penilaian implementasi *e-Government* di Indonesia dan analisis serta pembahasan dari data sekunder tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data hasil penilaian implementasi *e-Government* negara-negara di dunia oleh PBB tahun 2010, 2012 dan 2014, khususnya untuk negara Indonesia. Data sekunder berikutnya adalah penilaian implementasi *e-Government* di Indonesia oleh Direktorat *e-Government*, Ditjen. APTIKA-KEMKOMINFO RI (PeGI) tahun 2015.

5. PENILAIAN IMPLEMENTASI E-GOV

Dalam penelitian ini, penilaian implementasi *e-Government* di Indonesia mengambil dari dua sumber, dari lembaga dunia yaitu PBB dan dari dalam negeri yang dilakukan KEMKOMINFO RI.

PBB mendefinisikan *e-Government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik ke masyarakat. Sejak tahun 2003 PBB mengembangkan indeks pengembangan *e-Government* (*e-government*

development index-disingkat EGDI). EGDI adalah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK untuk menyediakan dan memberikan layanan publik. EGDI diukur berdasarkan 3 komponen penilaian yang berbobot sama, yaitu [8]:

1. *Online Service Component (OSC)*
2. *Telecommunicaitaion Infrastructure Component (TIC)*
3. *Human Capital Component (HCC)*

Pengukuran *Online Service Component* menggunakan hasil pengamatan terhadap *website* pemerintah pusat, berbagai portal nasional dan beberapa *website* kementerian yang relevan. Sedangkan pengukuran dua sub indeks lainnya menggunakan data sekunder [8].

Telecommunicaitaion Infrastructure Component merupakan rata-rata aritmetik dari lima indikator yaitu [8]:

1. Jumlah pengguna internet per 100 penduduk,
2. Jumlah pemakai saluran telepon per100 penduduk,
3. Jumlah pengguna telepon seluler per 100 penduduk,
4. Jumlah pelanggan internet tetap per 100 penduduk, dan
5. Jumlah pengguna fasilitas *broadband* per 100 penduduk.

Human Capital Component adalah rata-rata terbobot dari dua indikator yaitu [8]:

1. Rata-rata kemampuan membaca orang dewasa
2. Rasio partisipasi kasar siswa sekolah dasar sampai menengah atas .

Berikut adalah Tabel 1 hasil penilaian implementasi *e-Government* di Indonesia oleh PBB tahun 2010 dan 2012 yang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Tabel 1. EGDI Negara ASEAN 2010 dan 2012 [9]

No.	Country	E-gov. development index		World e-gov. development ranking	
		2012	2010	2012	2010
1.	Singapore	0.8474	0.7476	10	11
2.	Malaysia	0.6703	0.6101	40	32
3.	Brunei Darussalam	0.6250	0.4796	54	68
4.	Viet Nam	0.5217	0.4454	83	90
5.	Philippines	0.5130	0.4637	88	78
6.	Thailand	0.5093	0.4653	92	76
7.	Indonesia	0.4949	0.4026	97	109
8.	Lao People's Dem. Rep	0.2935	0.2637	153	151
9.	Cambodia	0.2902	0.2878	155	140
10.	Myanmar	0.2703	0.2818	160	141
11.	Timor-Leste	0.2365	0.2273	170	162
Regional Average		0.4793	0.4250		
World Average		0.4882	0.4406		

Tabel 2 berikut adalah hasil penilaian implementasi *e-Government* diIndonesia oleh PBB tahun 2014 yang dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN.

Tabel 2. EGDI Negara ASEAN 2014 [10]

No	Rank	Country	EGDI	OSC	TIC	HCC
1	3	Singapore	0.9076	0.9921	0.8793	0.8515
2	52	Malaysia	0.6115	0.6772	0.4455	0.7119
3	86	Brunei Darussalam	0.5042	0.3622	0.3690	0.7815
4	95	Philippines	0.4768	0.4803	0.2451	0.7051
5	99	Viet Nam	0.4705	0.4173	0.3792	0.6148
6	102	Thailand	0.4631	0.4409	0.2843	0.6640
7	106	Indonesia	0.4487	0.3622	0.3054	0.6786
8	139	Cambodia	0.2999	0.1732	0.2075	0.5189
9	152	Lao People's Dem. Rep.	0.2659	0.1417	0.1618	0.4941
10	161	Timor Leste	0.2528	0.2047	0.0704	0.4831
11	175	Myanmar	0.1869	0.0236	0.0084	0.5288

Tahun 2012 posisi Indonesia naik 12 peringkat, dari 109 pada tahun 2010 menjadi peringkat 97. Indonesia juga dimasukkan ke dalam daftar negara dengan kinerja terbaik bersama dengan 30 negara lainnya. Tetapi tahun 2014 posisi Indonesia kembali turun ke posisi 106, turun 9 peringkat. Dari nilai EGDI juga terjadi penurunan dari 0,4949 menjadi 0,4487. Penurunan peringkat dan nilai EGDI ini tidaklah cukup berarti jika dilihat perkembangan kemajuan *e-Government* di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Sebagai contoh, lelang pengadaan *online (e-procurement)* memasuki babak baru, setelah pada akhir 2011, Instruksi Presiden No. 17/2011, mewajibkan semua lembaga negara menggunakan *e-procurement*, dengan target yang jelas. Lembaga di tingkat pusat harus menggunakan *e-procurement* untuk 75% anggaran pengadaan yang dialokasikan, sedang lembaga di daerah, karena beragam pertimbangan (termasuk kesiapan), cukup 40%. Selain itu, banyak pemerintah daerah juga berlomba memberikan layanan perijinan yang lebih transparan. Bahkan pada tahun 2010, Kota Yogyakarta, sebagai contoh, masuk dalam peringkat lima dunia untuk kemudahan dalam mendapatkan ijin mendirikan bangunan, dibandingkan dengan birokrasi serupa di 183 negara yang disurvei oleh Bank Dunia.

Berikut Tabel 3 perkembangan peringkat Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara ASEAN sejak edisi 2003, yang disarikan dari 7 edisi yang dirilis oleh PBB. Terlepas dari metodologinya yang terus disempurnakan hingga kini, selama kurun waktu sepuluh tahun, peringkat Indonesia cenderung menurun dari tahun 2003 sampai 2010. Baru pada edisi 2012 Indonesia mulai meningkat lagi, tetapi menurun lagi di tahun 2014. Secara umum peringkat negara ASEAN relatif stabil atau fluktuatif selama satu dasawarsa, kecuali Thailand dan Filipina yang cenderung menurun hingga edisi terakhir.

PROSIDING SEMMAU 2016

Tabel 3. Peringkat *e-Government* Negara ASEAN[10]

No.	Country	2003	2004	2005	2008	2010	2012	2014
1.	Singapore	12	8	7	23	31	10	3
2.	Malaysia	43	42	45	34	32	40	52
3.	Brunei Darussalam	55	63	73	82	68	54	86
4.	Viet Nam	97	132	205	91	90	83	99
5.	Philippines	33	47	41	66	78	88	95
6.	Thailand	56	50	46	64	76	92	102
7.	Indonesia	70	85	96	106	109	97	106
8.	Lao People's Dem. Rep.	149	144	147	156	151	153	152
9.	Cambodia	134	129	128	139	140	155	139
10.	Myanmar	126	123	129	144	141	160	175
11.	Timor Leste	169	174	144	155	162	170	161

Di Indonesia pemeringkatan *e-Government* oleh lembaga Direktorat *e-Government*, Ditjen. APTIKA-KEMKOMINFO.

Peserta pemeringkatan dikelompokkan sesuai dengan jenis lembaga, yaitu pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah kota (pemkot), lembaga kementerian, dan non kementerian.

Asesmen menggunakan kriteria yang dijelaskan secara sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak. Selanjutnya metoda dan hasil asesmen dipublikasikan. Evaluasi ini dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuan (*trend*). Asesmen terdiri dari Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang. Sistem penilaian yaitu dengan pemberian peringkat (*rating*) pada para peserta yang dilakukan untuk masing masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut [9]:

$3,60 \leq$ sangat baik $\leq 4,00$

$2,60 \leq$ baik $< 3,60$

$1,60 \leq$ kurang $< 2,60$

$1,00 \leq$ sangat kurang $< 1,60$

Tabel 4 berikut menyajikan hasil penilaian implementasi *e-Government* untuk pemerintah provinsi.

Tabel 4. PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015[11]

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3,50	3,40	3,37	3,57	3,13	3,39	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	2,80	3,07	3,20	3,13	3,13	3,07	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3,27	3,20	3,20	2,80	2,57	3,01	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2,67	2,73	2,80	3,40	3,13	2,95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2,50	3,00	3,20	2,79	3,00	2,90	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2,90	2,50	2,50	2,80	2,60	2,66	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3,00	2,20	2,67	2,80	2,53	2,64	BAIK
8	Provinsi Bali	2,50	2,50	2,80	2,80	2,53	2,63	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2,67	2,87	2,53	2,50	2,53	2,62	BAIK
10	Provinsi Jambi	2,50	2,50	2,73	2,83	2,50	2,61	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,60	2,50	2,40	2,57	2,63	2,54	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2,80	2,70	2,80	2,50	1,80	2,52	BAIK
13	Provinsi Aceh	2,33	2,33	2,53	2,53	2,80	2,51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2,20	2,33	2,53	2,20	2,40	2,33	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2,07	1,93	2,13	2,13	1,80	2,01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,00	2,00	1,53	1,93	1,93	1,88	KURANG
17	Provinsi Lampung	1,93	1,53	1,73	1,87	1,73	1,76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1,87	1,93	1,53	1,67	1,67	1,73	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1,60	1,53	1,60	2,07	1,80	1,72	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1,56	1,75	1,46	1,47	1,45	1,54	KURANG
	RATA-RATA	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,50	BAIK

Dari hasil penilaian implementasi *e-Government* oleh KEMKOMINFO ini, secara rata-rata baik, walaupun tidak seluruh provinsi yang ikut dalam penilaian ini.

Dari dua penilaian terhadap implementasi *e-Government* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa layanan *online* di Indonesia masih sangat kurang, infrastruktur telekomunikasi harus terus ditingkatkan, begitu juga kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, kondisi mutakhir di Indonesia menunjukkan peluang sekaligus tantangan. Salah satu peluang adalah perkembangan penetrasi internet di Indonesia yang luar biasa, meskipun masih sekitar 21% dari total penduduk. Menurut data Nielsen, saat ini sebanyak 55 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet, hampir setengahnya (48%) melalui mengakses melalui ponsel, dan sekitar 13% dari perangkat bergerak lainnya (seperti tablet). Pengembangan layanan *online-Government* melalui ponsel dan perangkat bergerak lain, yang sering disebut dengan layanan *m-Government* (*mobile government*), harusnya menarik dipertimbangkan untuk masa

depan. Di Indonesia beberapa layanan *m-Government* sudah bisa ditemukan, seperti mengecek status aplikasi perijinan melalui SMS. Sektor swasta nampaknya sudah memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik, dengan mengembangkan beragam layanan bergerak. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah termasuk di antaranya adalah ketimpangan kualitas infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah yang beragam, variasi tingkat melek internet dan teknologi secara umum antar daerah di Indonesia. Namun, beberapa contoh sukses di lapangan seharusnya memicu banyak pemerintah daerah untuk selalu berusaha mengembangkan *e-Government* secara lebih baik lagi. Sebagai contoh, Sragen atau Jembrana. Kedua kabupaten ini tidaklah kaya, tetapi semangat dan niat baiknya dalam memberikan layanan *e-Government* kepada masyarakat telah mengalahkan tantangan yang ada. Dibutuhkan kreativitas di sini. Namun, yang tidak kalah penting adalah adanya *political will* dari pemimpin, termasuk bupati dan parlemen lokal.

6. KESIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi *e-Government* di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *e-Government* di Indonesia, menurut lembaga dunia PBB masuk dalam kategori menengah jika ditinjau dari nilai EGDI, yaitu rata-rata sebesar 0,4487 dari tahun 2010-2014.
2. Implementasi *e-Government* di Indonesia, menurut KEMKOMINFO masuk dalam kategori baik jika dilihat dari tingkat provinsi, yaitu rata-rata sebesar 2,5 tahun 2015.
3. Peluang terbesar Indonesia adalah perkembangan penetrasi internet di Indonesia yang luar biasa, saat ini sebanyak 55 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet, hampir setengahnya (48%) melalui mengakses melalui ponsel, dan sekitar 13% dari perangkat bergerak lainnya.
4. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah termasuk di antaranya adalah ketimpangan kualitas infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah yang beragam, variasi tingkat melek internet dan teknologi secara umum antar daerah di Indonesia.

REFERENSI

- [1] World Bank. "e-Government for All – Review of International Experience with Enhancing Public Access, Demand and Participation in e-Government Services: Toward a Digital Inclusion Strategy for Kazakhstan". ISG e-Government Practice Technical Advisory Note (Draft version 30 June 2006).
- [2] Liikanen, Erkki. "E-Government and the European Union". *The European Journal for the Informatics Professional*, Vol. IV, No. 2. April 2003.
- [3] Forman, Mark, *e-Government: Using IT to transform the effectiveness and efficiency of government* (2005)
- [4] ESCAP/APCICT. "Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pimpinan, Modul 3, 2009
- [5] National Information Society Agency, Bridging Asia through e-Government, (Asia e-Government Forum 2007, Seoul, Republic of Korea, 20 September 2007).
- [6] Novita, Dien. *Korelasi Korupsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesuksesan E-Government di Suatu Negara*. CSGTEIS 2013. Universitas Udayana. Bali. 2013.
- [7] Novita, Dien. *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan*. *Jurnal Eksplora Informatika*. Vol. 4 No. 1. September 2014. STIKOM Bali.
- [8] E-Government Survey 2010, United Nation.
- [9] E-Government Survey 2012, United Nation.
- [10] E-Government Survey 2014, United Nation.
- [11] <http://pegi.layanan.go.id/> diakses tanggal 1 Agustus 2016



STIKOM UYELINDO KUPANG

Jalan Perintis Kemerdekaan I -Kayu Putih Kupang-NTT
Telp; 0380-8554500, 85554499, Fax.0380-8554502

Website: <http://www.uyelindo.ac.id>

Website: <http://www.semmau.uyelindo.ac.id>

Email: stikom@uyelindo.ac.id, semmau@uyelindo.ac.id

PROGRAM STUDI :

SISTEM INFORMASI (S1) TERAKREDITASI

TEKNIK INFORMATIKA (S1) TERAKREDITASI

TEKNIK INFORMATIKA (D3) TERAKREDITASI

ISBN



978-602-73628-0-3